

LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNG JAWABAN TA. 2022



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2023

## KATA PENGANTAR

Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan good governance sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Agar progres laporan dapat tersaji dengan jelas, maka LKPJ Bappelitbangda Tahun Anggaran 2022 lebih fokus pada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah fungsi penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan, oleh karena itu, obyek analisis pada Bab II merupakan capaian indikator kinerja urusan dan program serta realisasi keuangan.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih baik di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua agar selalu ikhlas dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Benteng, Januari 2023  
**KEPALA BAPPELITBANGDA**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**Drs. H. BASOK LEWA**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. : 19640310 198611 1 002



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB.I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Dasar Hukum .....	1
1.2. Gambaran Umum OPD .....	3
1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural .....	16
<b>BAB.II. Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....</b>	<b>19</b>
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	19
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	19
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama .....	52
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan.....	53
2.1.4. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.....	54
2.1.5. Inovasi.....	71
2.1.6. Prestasi / Penghargaan.....	72
2.2. Kebijakan daerah.....	72
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021 .....	73
<b>BAB.III. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan dan Penugasan ..</b>	<b>74</b>
2.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang dilaksanakan .....	74
2.2. Hambatan – Hambatan .....	74
<b>BAB.IV. Penutup .....</b>	<b>75</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022 .....	16
Tabel 1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2022.....	17
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Tahun 2022.....	18
Tabel 2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	20
Tabel 2.2. Capaian IKU Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022.....	52
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022.....	53
Tabel 2.4. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2022.....	58
Tabel 2.5. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan .....	70
Tabel 2.6. Kebijakan Daerah yang ditetapkan tahun 2022 .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappelitbangda Kepulauan Selayar .....	6
Gambar 2.1. Tampilan Website sigesit.....	71

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban disusun sebagai amanat dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini memuat hasil penyelenggaraan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 84 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

#### **1.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47)
7. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 481);

8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 727) ;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 523).

## **1.2. Gambaran Umum OPD**

Tipe Kantor dari Bappelitbangda adalah Tipe A, hal ini terwujud dari uraian tugas dan fungsi yang di bebaskan kepada Bappelitbangda yakni, Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, beralamat di jalan Jend. Achmad Yani No. 1 Benteng, Email : [kepeg.bappedasly@gmail.com](mailto:kepeg.bappedasly@gmail.com) dengan titik koordinat X -6,120087 dan Y 120.466638.

Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dimana, salah satu fungsinya adalah melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Perumusan rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

### 1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, disebutkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

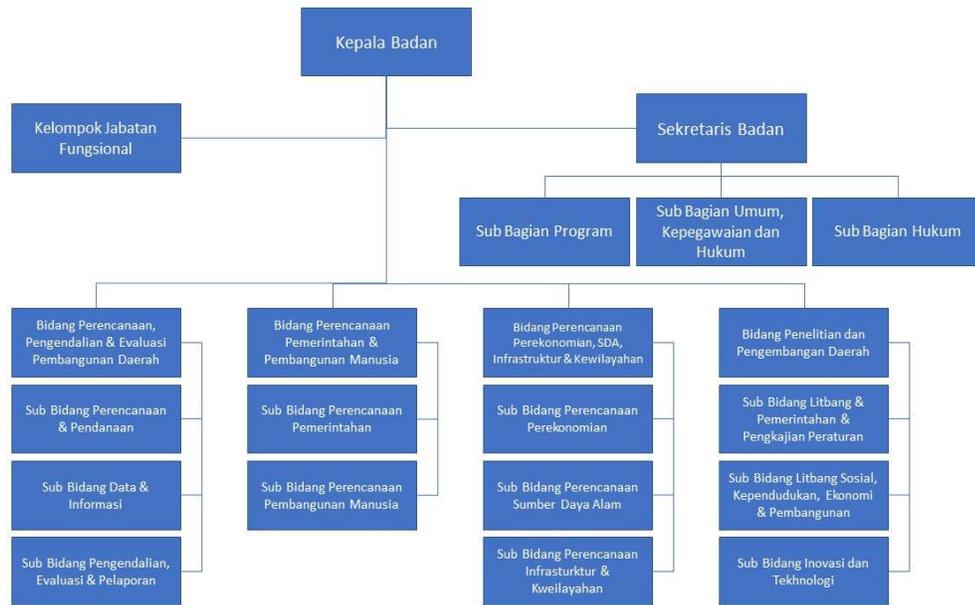
Susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
  - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas:
  - a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. Subbidang Data dan Informasi; dan
  - c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
  - a. Subbidang Perencanaan Pemerintahan; dan
  - b. Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia.
5. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
  - a. Subbidang Perencanaan Perekonomian;
  - b. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam; dan
  - c. Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
  - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
  - b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
  - a. Perencana Ahli; dan

b. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Bappelitbangda digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kep Selayar



Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No 75 Tahun 2020

Uraian tugas dan fungsi Kepala Bappelitbangda, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis maupun administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris melaksanakan Fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan Fungsional lingkup Badan;

- e. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Badan;
- i. penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Badan;
- j. penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi lingkup Badan; dan
- k. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta

pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;

- c. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

(3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana tersebut di atas, membawahi :

- a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pendanaan;
- b. Subbidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang data dan informasi.
- c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

- (4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai Tugas dan Fungsinya.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

- a. Subbidang Perencanaan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan;

b. Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang pembangunan manusia.

(5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan Tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

- a. Subbidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menyiapkan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan perekonomian;
- b. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan sumber daya alam;
- c. Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.

(6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
- g. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan Fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan;
- c. Subbidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

#### 1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan data kepegawaian Bappelitbangda Kepulauan Selayar per Desember 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 30 pegawai. Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 33 pegawai, Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar adalah sebanyak 63 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel. I.1.  
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan  
Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>26</b>	<b>86,67%</b>	<b>41,27%</b>	<b>23</b>	<b>69,70%</b>	<b>36,51%</b>
1	S3	1	3,33%	1,59%			
2	S2	10	33,33%	15,87%			
3	S1	14	46,67%	22,22%	23	69,70%	36,51%
4	D3	1	3,33%	1,59%			
	<b>Bukan Perguruan Tinggi</b>	<b>4</b>	<b>13,33%</b>	<b>6,35%</b>	<b>10</b>	<b>30,30%</b>	<b>15,87%</b>
1	SMA	4	13,33%	6,35%	10	30,30%	15,87%
	Jumlah	30			33		
	<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)</b>	<b>63</b>					

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2022

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 30 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 7 pegawai (23%), golongan III sebanyak 20 pegawai (20%), dan golongan II sebanyak 3 pegawai (10%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel. I.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2022

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	7	23%
	IV/c	1	3%
	IV/a	6	20%
2.	Golongan III	20	67%
	III / d	10	33%
	III / c	1	3%
	III / b	6	20%
	III / a	3	10%
3.	Golongan II	3	10%
	II / d	1	3%
	II / c	1	3%
	II / b	1	3%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2022

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 31 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3.23 %) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (16,13%) yang menduduki eselon III, 3 pegawai (10%) yang menduduki eselon IV, 11 pegawai (37%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 10 pegawai (33%)

yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. I.3. Jumlah, Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3%
2	Eselon III	5	17%
3	Eselon IV	3	10%
4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	37%
5	Jabatan Fungsional Umum	10	33%
Jumlah		30	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2022

## **BAB II**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Bappelitbangda Kepulauan Selayar pada tahun 2022 melaksanakan Empat Program dengan 8 (delapan) kegiatan penunjang, 6 (enam) kegiatan bidang urusan perencanaan dan 3 (tiga) kegiatan bidang urusan penelitian dan pengembangan.

Rata-rata capaian kinerja program kegiatan mencapai 100% dengan realisasi keuangan 97,16% atau Rp.4.988.167.834 (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan beberapa kegiatan merupakan amanah RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, capaian kinerja sebagaimana tersebut, disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.1

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Penunjang Pemerintahan			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
					<b>3.349.423.600</b>	<b>3.309.886.494</b>			
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
					<b>18.115.000,00</b>	<b>18.115.000,00</b>			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
					1.500.000	1.500.000			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					2.115.000	2.115.000			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					3.000.000	3.000.000			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					3.000.000	3.000.000			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					3.000.000	3.000.000			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen						
		4.000.000	4.000.000						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan						
		16.000.000	16.000.000						
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>						
		<b>2.548.753.000</b>	<b>2.516.779.348</b>						

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAPPETITBANGDA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan 2.521.923.000	14 Bulan 2.489.949.348			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Laporan 16.000.000	24 Laporan 16.000.000			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan 7.810.000	2 Laporan 7.810.000			
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Laporan 3.020.000	1 Laporan 3.020.000			
				<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b> <b>6.000.000</b>	<b>100%</b> <b>5.998.000</b>			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Brang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan 3.000.000	4 Laporan 2.998.000			
				Penatausahaan Barang Milik Derah Pada SKPD	2 Laporan 3.000.000	2 Laporan 3.000.000			
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b> -	<b>0%</b> -	Target tidak tercapai akibat pagu anggaran		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7ASN -	- -			
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b> <b>352.907.800</b>	<b>100%</b> <b>352.411.273</b>			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	500 Buah 19.597.800	500 Buah 19.597.800			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAPPELITBANGDA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14 Koran	14 Koran			
					5.085.000	4.810.000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	87 Kali			
					328.225.000	328.003.473			
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	Target tidak tercapai akibat pagu anggaran		
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>			
					-	-			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	-	Target tidak tercapai akibat pagu anggaran		
					-	-			
				Pengadaan Mebel	2 Unit	-			
					-	-			
				Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	7 Unit	-			
					-	-			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	-			
					-	-			
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
					<b>257.485.800</b>	<b>250.593.093</b>			
				Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen	100 Persen			
					38.460.000	33.019.293			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen	100 Persen			
					219.025.800	217.573.800			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAPPETITBANGDA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
					<b>166.162.000</b>	<b>165.989.780</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit	17 Unit			
					127.830.000	127.738.430			
				Pemeliharaan Mebel	3 Unit	3 Unit			
					2.480.000	2.479.400			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit			
					9.490.000	9.490.000			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100M2	100M2			
					19.950.000	19.873.950			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 Unit	14 Unit			
					6.412.000	6.408.000			
	Urusan Perencanaan			<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>			
					<b>656.629.000</b>	<b>623.292.292</b>			
			RPJMD 2021-2026	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>			
					<b>371.959.000</b>	<b>357.121.517</b>			
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	3 Kali	2 kali			
					4.974.000	4.974.000			
	Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	30 Kali	3 Kali			
					177.003.000	170.811.588			
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Kali	1 Kali			
					15.275.000	15.275.000			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAPPELITBANGDA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali			
					38.115.000	38.115.000			
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	11 Kali	11 Kali			
					16.345.000	14.600.000			
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
					120.247.000	113.345.929			
		Inspektorat Propinsi		<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
					<b>47.918.000</b>	<b>47.376.487</b>			
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3077 Data	3077 Data			
					20.868.000	20.424.800			
				26 OPD		26 OPD			
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 Sistem	1 Sistem			
					13.500.000	13.401.687			
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
					13.550.000	13.550.000			
		RPJMD 2021-2026		<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
					<b>236.752.000</b>	<b>218.794.288</b>			
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	100 Kali	100 Kali			
					34.596.000	34.226.814			
				Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
					10.420.000	9.291.474			
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan			
					191.736.000	175.276.000			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAPPELITBANGDA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	100%			
					572.653.000	538.677.743			
			RPJMD 2021-2026	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>			
					<b>247.085.000</b>	<b>228.083.200</b>			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	11 Dokumen			
					9.738.000	9.648.000			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 OPD	11 OPD			
					11.540.000	6.525.000			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi			
					8.250.000	8.220.000			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	11 Dokumen	11 Dokumen			
					51.552.000	44.463.800			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen			
					12.026.000	10.816.000			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	5 Dokumen			
					20.400.000	17.775.000			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi			
					59.440.000	58.540.000			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	5 Dokumen			
					74.139.000	72.095.400			
			RPJMD 2021-2026	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam )</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>			
					<b>116.622.000</b>	<b>115.633.547</b>			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAPPELITBANGDA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan	3 Dokumen 16.216.000	3 Dokumen 16.076.000			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 OPD 4.740.000	3 OPD 4.719.000			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Rekomendasi 13.688.000	1 Rekomendasi 13.588.000			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Perekonomian	3 Dokumen 31.280.000	3 Dokumen 31.198.347			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	3 Dokumen 9.592.000	3 Dokumen 9.592.000			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 OPD 5.130.000	3 OPD 4.540.000			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Rekomendasi 10.962.000	1 Rekomendasi 10.962.000			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 Dokumen 25.014.000	3 Dokumen 24.958.200			
			RPJMD 2021-2026	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>80%</b> <b>208.946.000</b>	<b>100%</b> <b>194.960.996</b>			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	3 Dokumen 8.782.000	3 Dokumen 8.602.000			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 OPD 5.000.000	3 OPD 4.705.000			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAPPELITBANGDA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Rekomendasi 110.754.000	1 Rekomendasi 100.754.000				
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 Dokumen 56.594.000	3 Dokumen 56.563.796				
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan	11 Dokumen 10.962.000	11 Dokumen 10.886.400				
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11 OPD 6.770.000	11 OPD 3.525.000				
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Rekomendasi 1.883.000	1 Rekomendasi 1.803.000				
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	11 Dokumen 8.201.000	11 Dokumen 8.121.800				
	Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>100%</b> <b>555.236.000</b>	<b>100%</b> <b>516.311.305</b>				
			RPJMD 2021-2026	<b>Kegiatan Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan</b>	<b>100%</b> <b>301.399.000</b>	<b>100%</b> <b>300.586.279</b>				
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Dokumen 65.739.000	1 Dokumen 65.253.479				
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen 235.660.000	1 Dokumen 235.332.800				
			RPJMD 2021-2026	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>100%</b> <b>148.421.000</b>	<b>100%</b> <b>131.101.000</b>				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAPPELITBANGDA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen			
					148.421.000	131.101.000			
				<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>100%</b>	-			
					-	-	Terdapat Kegiatan yang sama pada Bappelitbangda Propinsi Sulawesi Selatan	Pagu Anggaran di Kembalikan ke daerah	
				Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	-			
					-	-			
				Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	-			
					-	-			
				<b>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>			
					<b>105.416.000</b>	<b>84.624.026</b>			
				Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen			
					50.549.000	47.607.500			
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	3 Kali	3 Kali			
					54.867.000	37.016.526			

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, indikator capaian kinerja kegiatan adalah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan terselesaikan 100% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Bappelitbangda yang tersusun dengan jumlah anggaran Rp.1.500.000, terealisasi sebesar Rp.1.500.000 dan hasilnya adalah 1 Dokumen Renja Bappelitbangda Tahun 2023;

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan jumlah anggaran Rp.2.115.000,- terealisasi sebesar Rp.2.115.000 dan hasilnya 1 Dokumen RKA Bappelitbangda Tahun 2023;

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

- SKPD dengan jumlah anggaran Rp.3.000.000, terealisasi sebesar Rp.3.000.000 dan hasilnya adalah 1 Dokumen Perubahan RKA Bappelitbangda tahun 2022;
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.  
Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan dengan jumlah anggaran Rp.3.000.000, terealisasi sebesar Rp.3.000.000 dan hasilnya adalah 1 Dokumen DPA Bappelitbangda Tahun 2022;
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.  
Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan jumlah anggaran Rp.3.000.000, terealisasi sebesar Rp.3.000.000 dan hasilnya adalah 1 Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda Tahun 2022;
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.  
Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran Rp.4.000.000, terealisasi sebesar Rp.4.000.000 dan hasilnya adalah 3 Dokumen (Dokumen Lakip Bappelitbangda, Dokumen

LKPJ Bappelitbangda, dan Dokumen LPPD Bappelitbangda);

g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.1.500.000, terealisasi sebesar Rp.1.500.000 dan hasilnya adalah 4 Laporan Evaluasi kinerja Bappelitbangda Per Triwulan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Indikator capaian kinerja Kegiatan adalah Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan terselesaikan 100% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan dengan jumlah anggaran Rp.2.521.923.000, terealisasi sebesar Rp.2.489.949.348 dan keluarannya 14 Bulan gaji ASN yang terbayarkan;

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran Rp.16.000.000, terealisasi sebesar Rp.16.000.000 dan keluarannya 12 Laporan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan Bappelitbangda;

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan jumlah anggaran Rp.7.810.000, terealisasi sebesar Rp.7.810.000 dan keluarannya 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran Bappelitbangda;

- d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan Pemeriksaan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan dengan jumlah anggaran Rp.3.020.000, terealisasi sebesar Rp.3.020.000 dan keluarannya 1 Dokumen tanggapan hasil pemeriksaan keuangan Bappelitbangda.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu dan terselesaikan 100% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan jumlah anggaran

Rp.3.000.000, terealisasi sebesar Rp.2.998.000 dan keluarannya 4 Laporan Asset Bappelitbangda;

- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan jumlah anggaran Rp.3.000.000, terealisasi sebesar Rp.3.000.000 dan keluarannya 2 Laporan rekonsiliasi asset Bappelitbangda.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Aparatur yang ditingkatkan Kualitas dan Kapabilitas dan terselesaikan 0% Kegiatan ini tidak terlaksana disebabkan pengurangan pagu anggaran.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselenggarakan dan terselesaikan 100% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.19.597.800, terealisasi sebesar Rp.19.597.800 dan keluarannya 500 Paket;

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Indikator capaian kinerja adalah Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.5.085.000, terealisasi sebesar Rp.4.810.000 dan keluarannya 14 koran/bahan bacaan;

- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran Rp.328.225.000, terealisasi sebesar Rp.328.003.473 dan keluarannya 116 Laporan Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah.

- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator capaian kinerja Kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Target 100% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.38.460.000, terealisasi sebesar

Rp.33.019.000 dan keluarannya tersedianya jaringan internet dan sumber daya air;

b. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.219.025.800, terealisasi sebesar Rp.217.573.800 dan keluarannya tersedianya honorarium PTT, Honorarium Supir, Honorarium Petugas Kebersihan dan penyediaan ATK.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dengan Target 100% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan jumlah anggaran Rp.127.830.000, terealisasi sebesar Rp.127.738.430 dan keluarannya 17 Unit yang terbayarkan Pajak dan 17 Unit yang terpelihara;

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Mebel yang dipelihara dengan jumlah anggaran

Rp.2.480.000, terealisasi sebesar Rp.2.479.400 dan keluarannya 3 Unit Mebel yang di perbaiki;

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan Target 100% dengan jumlah anggaran Rp.9.490.000, terealisasi sebesar Rp.9.490.000 dan keluarannya 12 Unit peralatan kantor yang dipelihara, seperti laptop, printer dan lainnya;

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah luas gedung kantor yang dipelihara dengan jumlah anggaran Rp.19.950.000, terealisasi sebesar Rp.19.873.000 dan keluarannya 100 M<sup>2</sup>;

- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi dengan jumlah anggaran Rp.6.412.000, terealisasi sebesar Rp.6.408.000 dan keluarannya 14 Unit sarana prasarana Gedung kantor yang dirawat, seperti pendingin ruangan, televisi, kulkas dan lainnya.

➤ **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, indikator capaian kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Dengan Dokumen Pelaksanaan Pembangunan dengan Target 100% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub. Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategi Pembangunan Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Teknokratik) yang disusun dengan jumlah anggaran Rp.4.974.000, terealisasi sebesar Rp.4.974.000 dan keluarannya 1 Dokumen Ranwal RKPD Tahun 2023;

b. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran Rp.177.003.000, terealisasi sebesar Rp.170.811.588 dan keluarannya 1 Dokumen telaahan RKPD 2023;

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Berita Acara Hasil Konsultasi Publik dengan dengan jumlah anggaran Rp.15.275.000, terealisasi sebesar Rp.15.275.000 dan keluarannya 1 Berita acara hasil konsultasi publik dokumen RKPD Tahun 2023;

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp.38.115.000, terealisasi sebesar Rp.38.115.000 dan keluarannya 1 berita acara musrenbang kabupaten;

e. Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Usulan musrenbang kecamatan yang Terverifikasi dengan jumlah anggaran Rp.16.345.000, terealisasi sebesar Rp.14.600.000 dan keluarannya 11 dokumen hasil musrenbang kecamatan yang terverifikasi;

f. Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) dengan jumlah anggaran Rp.120.247.000, terealisasi sebesar Rp.113.345.929 dan keluarannya 2 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen RKPD Tahun 2023 dan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2022).

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase

Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi yang Telah dianalisis untuk Perencanaan Pembangunan dengan Target 100% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

- a. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran Rp.20.868.000, terealisasi sebesar Rp.20.424.800 dan keluarannya 3.077 Data (SIPD) Pembangunan Daerah;

- b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Dibina Dalam Pemanfaatan Data dan Informasi dengan Target 99,27% dengan jumlah anggaran Rp.13.500.000, terealisasi sebesar Rp.13.401.687 dan keluarannya 40 Orang (40 OPD);

- c. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan dengan jumlah anggaran Rp.13.550.000, terealisasi sebesar Rp.13.550.000 dan Keluaran Buku profil Pembangunan Daerah Tahun 2022, sub kegiatan tersebut juga merupakan rekomendasi rewiu kinerja oleh Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dengan Target 100% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub. Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dengan jumlah anggaran Rp.34.596.000, terealisasi sebesar Rp.34.226.814 dan keluarannya 4 Laporan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;

b. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Kerjasama Daerah dikoordinasikan Pelaksanaanya dengan jumlah anggaran Rp.10.420.000, terealisasi sebesar Rp.9.291.474 dan Keluarannya 1 Laporan;

c. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran Rp.191.736.000, terealisasi sebesar Rp.175.276.000 dan Keluarannya 5 Laporan hasil valuasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022.

➤ **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Program Prioritas Perangkat Daerah Dengan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Dengan Target 80% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Terasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.9.738.000, terealisasi sebesar Rp.9.648.000 dan keluarannya 11 Dokumen;

b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.11.540.000, terealisasi sebesar Rp.6.525.000 dan keluarannya 11 Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi;

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah dengan jumlah anggaran Rp.8.250.000, terealisasi sebesar Rp.8.220.000 dan keluarannya 1 Rekomendasi;

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dengan jumlah anggaran Rp.51.552.000, terealisasi sebesar Rp.44.463.000 dan keluarannya 11 Laporan;

- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia yang Terfasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.12.026.000, terealisasi sebesar Rp.10.816.000 dan keluarannya 5 Dokumen;

- f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.20.400.000, terealisasi sebesar Rp.17.775.000 dan keluarannya 3 Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi;

- g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Manusia dengan jumlah anggaran Rp.59.440.000, terealisasi sebesar Rp.58.540.000 dan keluarannya 1 Rekomendasi;

- h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia dengan jumlah anggaran Rp.74.139.000, terealisasi sebesar Rp.72.095.400, dan keluarannya 5 Laporan.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Program Prioritas Perangkat Daerah Dengan Sasaran Prioritas

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan target 80% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Terasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.16.216.000, terealisasi sebesar Rp.16.076.000 dan keluarannya 3 Dokumen;

- b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan Target 99,56% dengan jumlah anggaran Rp.4.740.000, terealisasi sebesar Rp.4.719.000 dan Keluaran 3 Organisasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi;

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

Daerah Bidang Perekonomian dengan jumlah anggaran Rp.13.688.000, terealisasi sebesar Rp.13.588.000 dan Keluaran 1 Rekomendasi.

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Singkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD Pada bidang Perekonomian dengan jumlah anggaran Rp.31.280.000, terealisasi sebesar Rp.31.198.347 dan keluarannya 3 laporan.

- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJP, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang Terfasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.9.592.000, terealisasi sebesar Rp.9.592.000 dan Keluaran 3 Dokumen;

- f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.5.130.000, terealisasi sebesar Rp.4.540.000 dan

Keluaran 3 Organisasi Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang diasistensi;

- g. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Sumber Daya Alam.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam dengan Target 100% dengan jumlah anggaran Rp.10.962.000, terealisasi sebesar Rp.10.962.000 dan Keluaran 1 Rekomendasi;

- h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Singkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam dengan jumlah anggaran Rp. 25.014.000, terealisasi sebesar Rp.24.958.200 dan Keluaran 3 Laporan.

- 4. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Indikator capaian kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Program Prioritas Perangkat Daerah Dengan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan target 80% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Terfasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.8.782.000, terealisasi sebesar Rp.8.602.000 dan Keluaran 3 Dokumen;

- b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asisstensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.5.000.000, terealisasi sebesar Rp.4.705.000 dan Keluaran 3 Organisasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi;

- c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan jumlah anggaran Rp.110.754.000, terealisasi sebesar Rp.100.754.000 dan Keluaran 1 Rekomendasi;

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Singkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dengan jumlah anggaran Rp.56.594.000, terealisasi sebesar Rp.56.563.796 dan Keluaran 3 Laporan.

- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Terfasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.10.962.000, terealisasi sebesar Rp.10.886.400 dan Keluaran 12 Dokumen.

- f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistenesi Dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah. dengan jumlah anggaran Rp.6.770.000, terealisasi sebesar Rp.3.525.000 dan Keluaran 12 Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi.

- g. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan jumlah anggaran Rp.1.883.000, terealisasi sebesar Rp.1.803.000 dan Keluaran 1 Rekomendasi;

- h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD pada Bidang Kewilayahan dengan jumlah anggaran Rp.8.201.000, terealisasi sebesar Rp.8.121.800 dan Keluaran 12 Laporan.

➤ **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dengan target kinerja 100% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :
  - a. Sub. Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan jumlah anggaran Rp.65.739.000, terealisasi sebesar Rp.65.253.479 dan keluarannya 1 Dokumen.

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan Umum dengan Target 99,86% dengan jumlah anggaran Rp.235.660.000, terealisasi sebesar Rp.235.332.800 dan keluarannya 1 Dokumen (Survei Indeks Kepuasan Masyarakat)

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang Dimanfaatkan dengan target kinerja 100% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial, Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial dengan jumlah anggaran Rp.148.421.000, terealisasi sebesar

Rp.131.101.000 dan keluarannya 1 Dokumen (Survei Indeks Kesalehan Sosial).

3. Kegiatan Pengembangan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Perangkat Daerah Yang Mengembangkan Inovasi dan Teknologi Daerah dengan Target 50% sesuai target kinerja Renstra tahun 2022. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi, Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan jumlah anggaran Rp.50.549.000, terealisasi sebesar Rp.47.607.500 dan keluarannya 1 Dokumen.
- b. Sub. Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan, Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif, dengan jumlah anggaran Rp.54.867.000, terealisasi sebesar Rp.37.016.526 dan keluarannya 3 Jenis penelitian yang di diseminasikan.

### 2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Sebagai implementasi dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kepulauan Selayar Nomor : 18/I/Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, disampaikan bahwa hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Capaian IKU Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	80	100	125
		Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan prioritas sasaran pembangunan daerah	%	80	100	125
2.	Meningkatnya penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik	%	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar

Dari tabel diatas, Bappelitbangda memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 2 (dua) sasaran strategis Bappelitbangda

Kepulauan Selayar. dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 116.67%.

### 2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai dua bidang Urusan Pemerintahan yang utama menjadi kewenangannya yakni : 1) Urusan Perencanaan dan 2) Urusan Penelitian dan Pengembangan, serta 3) urusan penunjang, Adapun capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3  
Capaian Kinerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
<b>Usuran Perencanaan</b>						
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	80	100	125
	Program, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan prioritas sasaran pembangunan daerah	%	80	100	125
<b>Usuran Penelitian dan Pengembangan</b>						
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik	%	100	100	100
<b>Usuran Penunjang</b>						
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Sakip	Nilai	B	n/a	n/a
		Persentase Nilai Temuan Keuangan	%	0	n/a	n/a

Sumber : Bappelitbangda Kep Selayar 2022

Tabel 3.3 di atas menunjukkan realisasi capaian kinerja bidang urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, Adapun hasil realisasi kinerja pada urusan penunjang, sampai dengan saat ini, belum dapat disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2022, disebabkan pelaksanaan Evaluasi SAKIP tahun 2022 dan pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

##### **1) Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.**

Indikator kinerja program diukur berdasarkan Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD, Indikator ini diwujudkan dengan meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang didukung pengendalian dan evaluasi serta penyediaan data informasi kebutuhan perencanaan, juga merupakan representasi dari kualitasnya perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian keselarasan tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 terdapat 287 (dua ratus delapan puluh tujuh)

program dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 terdapat 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) program. Hal tersebut juga dapat dilihat pada Laporan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 oleh Bappelitbangda Propinsi Sulawesi Selatan dan juga pada Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 halaman 42;

2. Dari 273 program yang terdapat pada RKPD Tahun 2022, terdapat 249 program dianggarkan pada APBD dan sebanyak 24 program atau sebanyak 8,79 persen yang tidak dianggarkan pada APBD;
3. Dari 738 kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2022, terdapat 596 kegiatan dianggarkan pada APBD dan sebanyak 142 kegiatan atau sebanyak 19,24 persen yang tidak dianggarkan pada APBD;
4. Dari 2177 sub kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2022, terdapat 1616 sub kegiatan dianggarkan pada APBD dan sebanyak 1101 sub kegiatan atau sebanyak 40,52 persen yang tidak dianggarkan pada APBD.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, didukung dengan kegiatan 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah, dan 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini, diantaranya adalah :

1. Kegiatan rapat-rapat guna klarifikasi hasil finalisasi Program kegiatan dan sub kegiatan;
2. Sistem informasi Perencanaan Pembangunan e-planning (SIPD), dan;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen RKPD.

Saat ini Bappelitbangda menggunakan aplikasi e-planning terpusat yang disediakan oleh kemendagri, sistem ini berfungsi sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah dalam proses perencanaan yang terintegrasi dengan beberapa sistem di kemendagri, seperti penganggaran, pelaporan dan evaluasi.

## **2) Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah**

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah program prioritas perangkat daerah yang sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah, Indikator ini diwujudkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah,

didukung dengan kegiatan yakni : 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Perumusan program prioritas tahun 2022 mengacu pada tema fokus dan sasaran pembangunan tahun 2022, dimana arah kebijakan nasional yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, Pembangunan infrastruktur berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pengelolaan sumber daya alam dengan memanfaatkan potensi kemaritiman, Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2022 sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka penjelasan keterkaitan antara sasaran prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas pembangunan daerah seperti tertuang pada dokumen RKPD perubahan tahun 2022 halaman 108 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2022

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1.	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Indeks pendidikan	Program pengelolaan pendidikan (SPM)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-15 tahun (Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni)	Disdikpora
				Program pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Disdikpora
				Program pengembangan kurikulum	Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar	Disdikpora
				Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum	Disdikpora
				Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Disdikpora
				Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Disdikpora
			Indeks kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (SPM)	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Dinkes
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Dinkes
					Rasio Tenaga Kesehatan (dokter, tenaga medis dan bidan) per satuan penduduk	Dinkes
			Indeks ketahanan sosial	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Program pengembangan kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan
Angka kriminalitas	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan					

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAPPELITBANGDA

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
2.	Pembangunan infrastruktur berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Meningkatnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks kualitas air	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	DLH
			Indeks kualitas udara	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	DLH
			Indeks kualitas tutupan lahan	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DLH
				Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	DLH
3.	Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks desa membangun	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Cakupan Sarana pertanian	Dinas Pertanian
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita disetarakan	Program pemberdayaan sosial	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil (KAT) yang mendapatkan pengembangan kemampuan dan potensi	Dinas Sosial	
			Program rehabilitasi sosial (SPM)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Dinas Sosial	
			Program penanganan bencana (SPM)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Dinas Sosial	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAPPELITBANGDA

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
				Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dinas PMPTSPTK
				Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Cakupan ketersediaan infrastruktur cadangan pangan	Dinas Pertanian
				Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	Dinas Pertanian
				Program perencanaan dan pembangunan industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Disperindag UMKM
				Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Disperindag UMKM
				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Disperindag UMKM
				Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Peningkatan Penyediaan Sarana Pendistribusian Perdagangan	Disperindag UMKM
				Program pengembangan umkm	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Disperindag UMKM
				Program pemasaran pariwisata	Jumlah Promosi Pariwisata yang dikembangkan	Disparbud
		Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian perdesaan	Tingkat pengangguran terbuka	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas PMPTSPTK
			Angka kemiskinan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	DP3AP2KB
				Program pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	DP3AP2KB

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAPPELITBANGDA

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
				Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	DP3AP2KB
				Program pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak	DP3AP2KB
				Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	DP3AP2KB
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	DP3AP2KB
				Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera	DP3AP2KB
				Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	DPK
				Program pengembangan sumber daya manusia	Cakupan ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Sosio-kultural dan Diklat Teknis	BKPSDM
4.	Pengelolaan sumber daya alam dengan memanfaatkan potensi kemaritiman	Meningkatnya usaha perikanan, pariwisata serta Industri, Transportasi dan Perdagangan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Program promosi penanaman modal	Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan	Dinas PMPTSPTK
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
				Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD kabupaten	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	Disparbud
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparbud
			Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Peningkatan Penyediaan Sarana Pendistribusian Perdagangan	Disperindag UMKM
				Program pengembangan ekspor	Jumlah Komoditi Perdagangan dengan Kualitas Ekspor	Disperindag UMKM

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAPPELITBANGDA

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
5.	Pemantapan pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat	Program perencanaan dan pembangunan industri	Jumlah Industri yang Terbangun	Disperindag UMKM
				Program pengelolaan pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	Dinas Perhubungan
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Semua OPD
				Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satpol PP Damkar & Penyelamatan
				Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non kebakaran	Satpol PP Damkar & Penyelamatan
				Program penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD
				Program penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD
				Program pengelolaan persampahan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	DLH
				Program pendaftaran penduduk	Perekaman KTP Elektronik	Disdukcapil
				Program pencatatan sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil
			Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo SP	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAPPELITBANGDA

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
			Nilai sakin daerah	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Diskominfo SP
				Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Diskominfo SP
				Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Disperindag KUKM
				Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Capaian Kinerja Program RPJMD	Bappelitbangda
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd dan APBD	Bappelitbangda
				Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan untuk inovasi	Bappelitbangda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Program pengelolaan keuangan daerah	Rasio Belanja Daerah terhadap Pendapatan Daerah	BPKPD
				Program pengelolaan barang milik daerah	Assets Management	BPKPD
				Program kepegawaian daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKPSDM
				Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat

Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Tabel 3.6 diatas menunjukkan keselarasan terkait indikator kinerja 64 (enam puluh empat) program prioritas perangkat daerah dengan 17 (tujuh belas) indikator sasaran prioritas pembangunan daerah, hal tersebut juga dapat dilihat pada laporan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 oleh Bappelitbangda Propinsi Sulawesi Selatan dan juga pada Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 halaman 108.

### **3) Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik**

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan Jumlah hasil penelitian atau kajian yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Indikator ini diwujudkan dengan meningkatkan inisiasi hasil penelitian dan pengkajian yang aplikatif sebagai materi naskah akademik atau dalam bentuk pengambilan kebijakan (Policy Brief) bagi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta, infrastruktur dan kewilayahan.

Arah kebijakan dan pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, didukung dengan kegiatan yakni : 1) Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan, 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, 3) Penelitian dan Pengembangan

Bidang Ekonomi dan 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Terdapat 2 hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan daerah / naskah akademik pada kegiatan penyusunan rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2023, dan 1 hasil kelitbangan dimanfaatkan untuk inovasi daerah Tahun 2022. Adapun judul dari 3 kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yaitu :

1. Survei Kepuasan Masyarakat tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021;
2. Survei Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, dan;
3. Analisis Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.

Hasil Inovasi daerah terkait Analisis Indeks Daya Saing Daerah bertujuan untuk mendorong peningkatan aspek yang menjadi titik lemah daya saing daerah. Prioritas program penguatan daya saing daerah adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan nilai tambah produk-produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
- b) Peningkatan kualitas produk-produk UMKM;
- c) Peningkatan jaringan pemasaran produk-produk UMKM berbasis online;
- d) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kelitbangan;

- e) Peningkatan Kerjasama dan kemitraan Lembaga-lembaga inovatif;
- f) Pembangunan infrastruktur dasar fisik dan non fisik penguatan SIDA;
- g) Peningkatan budaya inovasi pada OPD dan Masyarakat;
- h) Peningkatan arus investasi yang sejalan dengan inovasi;
- i) Peningkatan kapasitas para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan;
- j) Peningkatan pelayanan publik berbasis digital;
- k) Penataan administrasi kependudukan berbasis digital;
- l) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- m) Pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi.

Tahun 2022, Bappelitbangda Kepulauan Selayar melaksanakan 5 (lima) kegiatan kelitbang, 2 (dua) diantaranya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah pada penyusunan naskah akademik / Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023, diantaranya : 1) Penyusunan Naskah Akademik (Ranwal) Dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045; 2) Dokumen Revisi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026; dan 3) Dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024). 3 (tiga) hasil kelitbang lainnya dimanfaatkan untuk inovasi daerah tahun 2023. Adapun judul dari 5 (lima) kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yaitu :

1. Survei Kepuasan Masyarakat tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022;

2. Survei Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022;
3. Kajian Evaluasi Penataan Dapil Pemilu 2024 di Kepulauan Selayar;
4. Laporan penginputan dan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
5. Laporan penginputan dan pengukuran Innovation Government Award.

#### 4) Nilai Sakip

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan penilaian Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pengukurannya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten, Indikator ini diwujudkan dengan meningkatkan kapabilitas kelembagaan perencana, koordinasi dan kompetensi sdm perencana.

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran ke-3, dengan indikator kinerja **Nilai Sakip** belum dapat disampaikan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2022, karena pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2022 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun target yang ingin dicapai oleh Bappelitbangda Kepulauan Selayar tahun 2022 mendapat nilai B (60) dengan capaian kinerja 100%.

Disampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian SAKIP Bappelitbangda nomor : 065/LAKIP/IV/2022/ITDA tanggal 13 April 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, bahwasanya

Bappelitbangda memperoleh nilai sebesar 52.36 dengan kategori CC (Cukup). Dengan demikian Bappelitbangda akan terus bekerja lebih giat agar dapat terus meningkatkan nilai Sakip yang diperoleh.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung dengan kegiatan yakni : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

#### **5) Persentase Nilai Temuan Keuangan**

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai temuan material pada laporan pemeriksaan regular oleh Inspektorat Kabupaten, Indikator ini diwujudkan dengan menerapkan pengelolaan sistem keuangan yang berbasis akrual sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan.

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran ke-3, dengan indikator kinerja ***Persentase Temuan Keuangan*** belum dapat disampaikan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2022, dikarenakan pelaksanaan reuiu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun target yang ingin dicapai tahun 2022 pada review Inspektorat sebesar 0% dengan capaian kinerja 100%.

Disampaikan bahwa berdasarkan surat tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor : 700/068/PKPT/VII/2022/ITDA/ tanggal 20 Juli 2022 dan laporan pemeriksaan regular pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022, bahwasanya untuk tahun 2021, Bappelitbangda Kepulauan Selayar **telah menindaklanjuti hasil temuan** yang tidak di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp.73.282.000.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung dengan kegiatan yakni : 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 2) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel. 2.5 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Urusan Perencanaan</b>								
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.229.282.000	1.161.970.035	67.311.965	94,52	2	100%	6	100%
<b>2</b>	<b>Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>								
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	555.236.000	516.311.305	38.924.695	92,99	1	100%	3	100%
<b>3</b>	<b>Urusan Penunjang</b>								
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.349.423.600	3.309.886.494	39.537.106	98,82	1	100%	8	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022

### 2.1.5. Inovasi

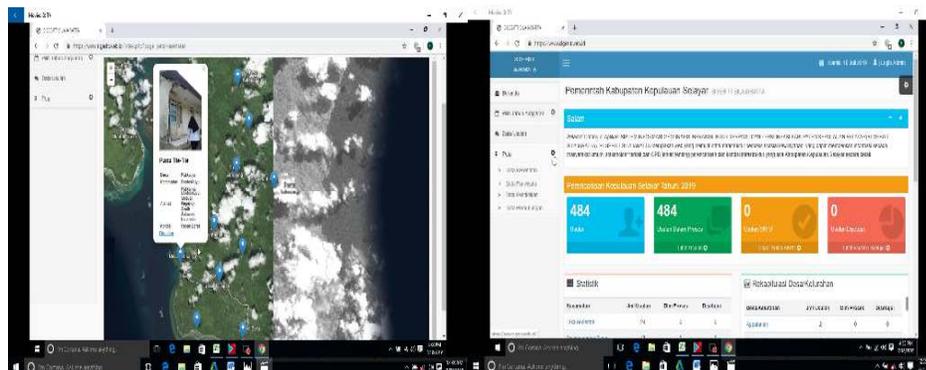
Perkembangan sistem informasi dan teknologi di era 4.0 pemerintah diuntut agar dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, mudah di akses dan berbiaya murah

Menjawab tantangan tersebut, Bappelitbangda Kepulauan Selayar sejak tahun 2021, membuat inovasi sistem Informasi Geografis Infrastruktur Terpadu dan Terkoneksi, yang berisi database fasilitas publik dan infrastruktur pemerintahan lainnya, data tersebut di tampilkan dalam bentuk website sehingga dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat.

Tujuannya adalah menyediakan data infrastruktur pada website SI-GESITT SILAJARATTA yang dapat akses secara publik dan secara internal di lingkungan OPD terkait.

Gambar 2.1

Tampilan Website [www.sigesit.web.id](http://www.sigesit.web.id)



Manfaat dari inovasi tersebut diantaranya : 1) stakeholder terkait dimudahkan dengan tersedianya peta atau informasi yang mudah diakses dan dianalisis untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan secara kewilayahan level legislatif dan eksekutif, 2) Masyarakat umum dapat

mengakses informasi perencanaan infrastruktur yang dibangun atau yang akan dibangun, 3) Masyarakat dan Pemerintah sampai tingkat desa dapat memberikan informasi kondisi riil infrastruktur di wilayahnya masing-masing dengan sistem informasi yang dibangun

### 2.1.6. Prestasi / Penghargaan

N/A

### 2.2. KEBIJAKAN DAERAH

Sesuai dengan kewenangannya, Bappelitbangda telah menyusun 2 (dua) dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah disahkan yakni :

Tabel 2.6 Kebijakan Daerah yang ditetapkan tahun 2022

N O	Kebijakan Strategis	Dasar HUKum		Tujuan / Masalah yang diselesaikan	Ket
		Nomor, Tanggal Pengesahan	Tentang		
	Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023	Nomor 22 Tahun 2022, Tanggal 1 Juli 2022	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan	Perbup
	Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023	Nomor 30 Tahun 2022, Tanggal 1 Agustus 2022	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Bupati Kepulauan Selayar	Perbup

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2022

### 2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD (Program/Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<b>NIHIL</b>		

**BAB III****CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN****3.1. Tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan**

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (Rp)
	<b>NIHIL</b>				

**3.2. Hambatan – Hambatan**

Bappelitbangda Kepulauan Selayar pada tahun 2022 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam bentuk tugas pembantuan.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Sistematika penulisannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban mengacu pada ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan adanya Hasil Evaluasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi nantinya akan dicermati, diperhatikan, dikoordinasikan dan ditindaklanjuti guna terwujudnya peningkatan kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang sehingga visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar 2021 – 2026 dapat tercapai.

Menyadari sepenuhnya, Laporan ini tak luput dari kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan penunjang pemerintahan selama Tahun Anggaran 2022. Segenap keberhasilan, prestasi maupun keterlambatan dan ketidak-sempurnaan dalam pengelolaan selama tahun 2022 telah disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, semoga Allah SWT akan selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dan semoga selalu meridhoi setiap usaha dalam mengemban tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.